



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMBALI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 733638

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.795.000.000**

1. Tanah Seluas 1.314 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.290 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah Seluas 1.154 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
8. Tanah Seluas 819 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 99.800.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F700RG TX MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000



2. MOTOR, HONDA AFX12021C08 MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 6.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 10.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 286.253.555

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.191.553.555

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.191.553.555

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FIRMAN KURNIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **733166**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 279.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, MAZDA CX-5 GT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 317.744.427

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.596.744.427

III. HUTANG Rp. 250.555.556

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.346.188.871

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. MUSLICH ZAINI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 865040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **815.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/202 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/213 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/223 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 130.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/282 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 90.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **557.500.000**

1. MOTOR, HONDA SPM. SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. MOBIL, HONDA CR-V RM3 2WD 2.4 AT CKD Tahun 2014, LAINNYA Rp. 250.000.000



3. MOTOR, YAMAHA SPM SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
285.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.202.484
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.377.702.484
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.377.702.484

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BENNY PADILAH**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **738689**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 15.221.920.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.321.920.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, Rp. 4.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/35 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/80 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, Rp. 850.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/50 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, Rp. 1.600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2.000 m2/250 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, Rp. 5.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/70 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, Rp. 550.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/40 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 331.750.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 185.250.000



2. MOBIL, HONDA SATYA / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000
3. MOTOR, HONDA SPD MOTOR R.2 Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000
4. MOTOR, HONDA SPD MOTOR R.2 Tahun 2015, WARISAN Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.020.894
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.555.690.894
III. HUTANG	Rp.	83.312.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.472.378.694

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.